

PERILAKU PEMILIH DI GAMPONG: DINAMIKA DEMOKRASI TINGKAT LOKAL DAN FAKTOR-FAKTOR PENENTU

Mellita Dewi

Universitas Teuku Umar

mellitadewi646@gmail.com

Devi Intan Chadijah

Universitas Teuku Umar

intanchadijah@utu.ac.id

Yeni Sri Lestari

Universitas Teuku Umar

yenisrilestari@utu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari perilaku pemilih dalam pemilihan keuchik di Gampong Gunong Kleng, yang menyoroti dinamika demokrasi pada tingkat gampong atau lokal serta praktik-praktik penentunya, seperti adanya money politik dan kekerabatan. Kegelisahan akademis mulai muncul karena adanya praktik money politik dan kekerabatan yang melanggar prinsip demokrasi yang jujur dan adil serta berpotensi mengikis integritas dan kualitas kepemimpinan pada tingkat gampong. Untuk penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan validitas yang diuji dengan triangulasi metode dan sumber. Informan penelitian meliputi tokoh masyarakat, masyarakat pemilih yang paham terkait praktik money politik dan kekerabatan yang terjadi di gampong melalui snow ball, dengan jumlah informan sekitar 15 orang sesuai dengan kebutuhan kedalaman data. Temuan penelitian menunjukkan perilaku pemilih masih sangat di pengaruhi oleh kedua praktik tersebut yakni money politik dan kekerabatan, yang mengakibatkan proses demokrasi di tingkat gampong belum ideal dan lebih didominasi oleh kepentingan kelompok tertetu atau individu, hal ini menandakan bahwa perlunya pendidikan politik dan pengawasan yang lebih ketat dan transparan untuk mewujudkan pemilih yang jujur dan rasional.

Kata Kunci: *Perilaku Pemilih, Demokrasi Tingkat Lokal, Politik Uang, Kekerabatan*

Abstract

This study begins with voter behavior in the village head election in Gunong Kleng Village, highlighting the dynamics of democracy at the village or local level and its determining factors, such as money politics and kinship. Academic concerns have arisen due to the practice of money politics and kinship, which violate the principles of honest and fair democracy and have the potential to erode the integrity and quality of village leadership. This study employs a qualitative method with data collection techniques such as observation, interviews, documentation, and validity tested through method and source triangulation. The research informants include community leaders and voters who are knowledgeable about the practices of money politics and kinship in the village, selected via snowball sampling, with approximately 15 informants based on the depth of data needed. The research findings indicate that voter behavior is still heavily influenced by

Article History: Received 12 Nov 2025, Revised Mar 2026,
Accepted 1 Apr 2026, Available online 1 Jun 2026

Copyright: © 20xx. The authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

these two practices money politics and kinship which result in a non-ideal democratic process at the village level, dominated by the interests of specific groups or individuals. This signals the need for political education and stricter, more transparent supervision to foster honest and rational voters.

Keywords: *Voter Behavior, Local Level Democracy, Money Politics, Kinship*

A. Pendahuluan

Demokrasi yang ada pada tingkat lokal menjadi pilar fundamental dalam mengelola tatanan pemerintah yang baik dan representatif. Namun kenyataannya, praktik dalam pelaksanaan demokrasi pada tingkat paling bawah yaitu pemilihan kepala gampong, menghadapi beberapa tantangan yang dapat mengancam kualitas dan integritas dalam proses demokrasi.¹ Akibat dari kedua praktik tersebut, money politik dan kekerabatan membuat masyarakat pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional sebagaimana yang telah ditetapkan oleh prinsip pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur dan adil. Oleh karena itu, pentingnya pemahaman dan penguatan demokrasi pada tingkat lokal menjadi sangat vital untuk diteliti untuk memahami bagaimana dinamika demokrasi di tingkat gampong.

Namun, dalam praktiknya pemilihan kepala gampong atau keuchik di Aceh masih sering diwarnai dengan persoalan yang dapat mengancam integritas dalam pemilihan dan kualitas demokrasi lokal. Seperti faktor money politik,² kegelisahan ini muncul ketika melihat praktik-praktik seperti ini ada di dalam masyarakat yang mencederai prinsip demokrasi dan juga dapat merusak kepercayaan dan menciptakan pemilihan yang adil dan jujur.

Dari kedua praktik tersebut, muncul berbagai penelitian yang mengkaji terkait fenomena money politik dalam pemilihan kepala desa di Indonesia.³ Sosialisasi dari tim penyelenggara atau pengawas pilkada kepada pemilih terkait bahaya nya money politik yang akan memberikan dampak yang signifikan, hal ini terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat yang lemah sehingga membuat mereka lebih mudah terpengaruh oleh hal seperti imbalan material dalam menentukan pilihan politiknya. Kondisi seperti ini yang menyebabkan keputusan pemilih tidak sepenuhnya berdasarkan atas pertimbangan rasional sesuai dengan kapasitas calon keuchik.

¹ Raja Songkup Pratama and others, 'Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Dusun VIII Komplek Veteran Desa Medan Estate', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), 1–5.

² Asha Yatri Saragih and Julia Ivanna, 'Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Dolog Hulan Kabupaten Simalungun', *Journal on Education*, 6.4 (2024), 20619–26
<<https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6114>>.

³ Effendi Hasan, Aminah Aminah, and Haji Jamaie Haji Hamil, 'The Practice of Money Politics in Village Head Elections and Its Effect on The Participation Level of Beginner Voters', *Governance and Public Policy*, 10 (2023).

⁴Di dalam pemilihan kepala gampong menciptakan berbagai masalah dalam demokrasi di tingkat lokal, seperti monopoli kekuasaan pada tingkat desa, melemahnya partisipasi dan tata kelola pemerintahan desa. Namun, secara komprehensif menganalisis dinamika demokrasi dalam konteks perilaku pemilih yang dapat dipengaruhi oleh dua praktik yakni money politik dan kekerabatan masih relative terbatas.

Lemahnya Pendidikan politik dan kurangnya pemahaman masyarakat terkait demokrasi, membuat perilaku pemilih dalam pemilihan keuchik sangat dipengaruhi oleh motivasi yang logis, yang mana mereka memilih dukungan berdasarkan untung dan rugi. Seperti melalui praktik money politik dan kekerabatan, yang sesuai dengan teori pilihan rasional. Pemilih lebih suka memilih calon yang dapat memberikan manfaat ekonomi, dari pada memikirkan kualitas dari calon pemimpin gampong. Hal ini berdampak yang membuat proses demokrasi di tingkat gampong atau lokal menjadi kurang ideal dan sering kali penuh dengan transaksi kepentingan pribadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami terkait pelaksanaan demokrasi dan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala gampong atau keuchik. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena mampu mengungkapkan proses, makna, serta perilaku pemilih dalam pemilihan pemimpin di tingkat lokal. ⁵Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya, validitas data yang dilakukan melalui triangulasi metode dan triangulasi sumber untuk memastikan kredibilitas dalam penemuan peneliti.

Dalam penelitian ini menemukan bahwa masih ada praktik pelanggaran yang terjadi secara sistemik dan masih jauh dari ideal dalam pemilihan kepala gampong. Praktik money politik dan kekerabatan ini membuat para pemilih tidak menggunakan hak pilihnya secara rasional, perilaku pemilih menunjukkan pola yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor money politik dan faktor kekerabatan yang masih kerap terjadi di masyarakat desa. Dalam temuan ini menunjukkan bahwasanya masih menghadapi tantangan fundamental dalam mewujudkan pemilih yang jujur dan adil.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. ⁶Dengan jenis pendekatan deskriptif, untuk memahami secara mendalam terkait demokrasi dan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala gampong atau keuchik. Lokasi penelitian di Gunong Kleng, subjek penelitian mencakup masyarakat yang melakukan pemilihan kepala gampong

⁴ RINI ANGGRIANI SYUKRI, 'No TitleAL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science', *DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN*, 2021, 1–51.

⁵ 'Analisis. "Teknik Pengumpulan Data.', *Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi 4*, 2014.

⁶ Adilla and others, 'Building Democracy From the Village: A Study of the Political Participation of the Sei Serdang Community', *Jurnal Mahasiswa Antropologi Dan Sosiologi Indonesia (JuMASI)*, 3.2 (2025), 79–94 <<https://doi.org/10.29103/jumasi.v3i2.12537>>.

atau keuchik. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan, setiap data yang sudah ditemukan, direkam, dan di catat guna menjaga keakuratan data. Selanjutnya data yang sudah diperoleh, dan di transkripsikan secara lengkap dan sesuai dengan jawaban informan guna mempermudah proses analisis, untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi metode yang menggabungkan data wawancara, observasi, serta dokumentasi.

C. Pelanggaran Prinsip Demokrasi dalam Pemilihan Keuchik: Money Politik dan Politik Kekerabatan

Pemilihan keuchik di Aceh yang merupakan demokrasi pada tingkat lokal yang masih menghadapi tantangan yang bertentangan dengan prinsip dalam pemilihan yang adil dan jujur, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari penyelenggaraan demokrasi pada tingkat gampong. Dua praktik yang dapat mempengaruhi integritas demokrasi di tingkat gampong ialah praktik money politik dan faktor kekerabatan, kedua praktik tersebut dapat mengancam kualitas kepemimpinan dan akuntabilitas pemerintahan pada tingkat gampong.

1. Praktik Money Politik dalam Pemilihan Keuchik

Dalam pemilihan keuchik, tindakan money politik dalam hal pemberian uang tunai, janji-janji material atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk memperoleh dukungan suara. Penelitian yang sudah dilakukan di berbagai daerah dan ke tingkat pemerintahan yang paling bawah⁷, termasuk dalam pemilihan keuchik di Aceh⁸, Politik uang di beberapa gampong di Aceh, di anggap hal yang *wajar* oleh sebagian masyarakat tersebut disetiap pemilihan pemimpin gampong atau keuchik.

Dampak dengan adanya money politik dalam pemilihan pemimpin di tingkat gampong, yang pertama dapat membuat pemilih cenderung lebih mengedepankan keuntungan materi dari pada kualitas pemimpin dan visi misi yang di tawarkan oleh calon keuchik⁹. Kemudian yang kedua money politik juga menciptakan ketidaksetaraan dalam pemilihan, di mana calon keuchik yang memiliki finansial yang lebih tinggi, akan mudah mendapatkan dukungan suara dari masyarakat pemilih. Jadi dengan maraknya perbuatan money politik akan melemahkan prinsip demokrasi yang ada, karena suara rakyat yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi, bisa dibeli dengan materi atau uang.

Ketiga, dengan adanya money politik ini akan mengakibatkan pemerintah yang korup. Disebabkan dengan terpilihnya pemimpin yang menggunakan money politik untuk

⁷ Iman Nur Hidayat and others, 'Peran KPU Ponorogo Dalam Penanggulangan Money Politic Pilkada Kabupaten Ponorogo', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 15 (2021) <<https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5528>>.

⁸ Fitri Juliana, 'Ada Politik Uang Di Pilkada Kota Banda Aceh', 27 November, 2024.

⁹ subrata t, 'ANCAMAN PIDANA BAGI MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 2022 <<https://doi.org/10.59635/jihk.v9i2.247>>.

memenangkan hak suara, akan berusaha mengembalikan modal politik yang sudah mereka keluarkan, dengan cara pengelapan dana gampong dan penyalahgunaan wewenang¹⁰. Hal ini dapat merusak tata kelola pemerintah pada tingkat gampong¹¹. Yang keempat, dengan adanya money politik ini dapat menurunkan kepercayaan public terhadap institusi pemilihan dan sistem demokrasi yang ada. ¹²Jika hal ini terus terjadi, akan membuat atau meningkatkan praktik korupsi yang tidak sehat di Indonesia, terkhusus di pemerintahan pada tingkat lokal.

2. Politik Keekerabatan sebagai Faktor Penentu Elektoral

Politik kekerabatan sering muncul dalam pemilihan kepala gampong yang memanfaatkan hubungan kekerabatan dan keluarga untuk membangun kekuasaan dan memperoleh dukungan politik yang tinggi. ¹³Dalam ranah pemilihan keuchik, masyarakat masih menerapkan sistem kekerabatan yang memiliki pengaruh cukup besar dalam konteks pemilihan di gampong.

Di Indonesia, termasuk Aceh, hubungan kekerabatan masih menjadi faktor yang dapat mempengaruhi terpilihnya calon kepala gampong. Kelompok dan keluarga semarga menjadi salah satu pengaruh dan dukungan utama yang diorganisir secara sistematis untuk memenangkan pemilihan yang sedang berlangsung. Penelitian yang dilakukan di Desa Dolog Hulan yang menunjukkan bahwa marga sangatlah kental dalam kehidupan bermasyarakat, dan setiap satu marga sudah dianggap sebagai keluarga. ¹⁴Maka hal ini sangat mempengaruhi adanya politik kekerabatan untuk memperoleh dukungan yang lebih tinggi dalam pemilihan kepala gampong.

Namun dalam praktiknya, politik kekerabatan melibatkan banyak mekanisme. Yang pertama, keluarga besar mampu memberikan pertimbangan kepada pemilih, terlebih seperti pemilih pemula agar memilih calon yang memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan. Yang kedua, anggota keluarga atau semarga menjadi titik sasaran calon keuchik untuk dapat memberikan dukungan suara. Yang ketiga, dengan adanya pemilih karena faktor kekerabatan atau keluarga dapat memberikan jaringan informasi terkait keadaan masyarakat dan hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat, agar dapat menyesuaikan dengan strategi kampanye yang akan di bawakan. ¹⁵Masih rendahnya pendidikan politik yang membuat masyarakat lemah dan tidak paham terkait bagaimana

¹⁰ Sacipto R., 'Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi', *Adil Indonesia*, 2019.

¹¹ Adnan Pattipeilohy, Nurbani Yusuf, and Trisakti Handayani, 'ANALISIS DAMPAK PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI SMAN 1 BALAURING LEMBATA NTT', *Civic Hukum*, 3 (2018).

¹² Mustari N, Yahya M., and M.Amin, 'Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Penguatan Civic Literacy Dalam Mewujudkan Desa Anti Money Politic Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Buakkang', *JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*, 2021 <<https://doi.org/10.31764/transformasi.v1i3.5618>>.

¹³ Hanifa Triyuli Amanda, Irzal Anderson, and Kuswanto, 'Analisis Hubungan Kekeluargaan Dalam Perilaku Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Aro Tahun 2022', *Academy of Education Journal*, 15 (2024).

¹⁴ Renaldi L., 'DINAMIKA POLITIK BERDESA : STUDI KASUS PILKADES DI DESA SUDIMORO, KECAMATAN SRUMBUNG, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH', *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2021 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.107>>.

¹⁵ Siagian A. M and Permatasari Y., 'Insecurisme Politik Rakyat Indonesia Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020', *POPULIKA*, 2022 <<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.37631/populika.v10i1.380>>.

menentukan pilihan rasionalnya, dalam memilih atau menentukan pemimpin yang baik dan benar sesuai dengan prinsip demokrasi.

Dampak dengan adanya politik kekerabatan dalam pemilihan pemimpin gampong sangat kompleks. Di satu sisi, dengan adanya politik kekerabatan ini dapat menjadi modal sosial bagi calon pemimpin gampong yang memiliki nilai positif yakni dapat membangun solidaritas dan kohesi sosial pada tingkat lokal.¹⁶ Namun di sisi lain, dengan adanya politik kekerabatan ini, dapat membuat masyarakat yang tidak bisa memilih sesuai dengan pilihan rasional mereka. Tanpa mereka sadari bagaimana visi dan misi kandidat untuk kemajuan gampong kedepannya.

3. Pertentangan dengan Prinsip Pemilihan yang Jujur dan Adil

Politik uang dan politik yang berdasarkan atas hubungan keluarga pada dasarnya amat bertentangan dengan aturan pemilihan pemimpin yang adil dan jujur, sebagaimana yang tertulis dalam konstitusi dan undang-undang.¹⁷ Sangat perlu di terapkan terkait pendidikan politik baik kepada pemilih dalam pemilihan secara langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Adapun Asas kejujuran yang mengharuskan semua pihak untuk terlibat dalam penyelenggaraan, peserta, dan pemilih, harus bersikap dan bertindak yang jujur sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.¹⁸ Money politik ini jelas melanggar asas karena melibatkan praktik suap dan transaksi ilegal yang bertentangan dengan peraturan.¹⁹ Namun jika dilihat berdasarkan hubungan keluarga, walaupun tidak selalu melanggar aturan resmi, namun sering kali disertai dengan berbagai bentuk kecurangan seperti mengintimidasi pemilih dan menggerakkan massa.

Adanya asas keadilan yang mengharuskan semua pemilih dan peserta pemilu diperlukan setara sehingga terhindar dari kecurangan. Politik uang menciptakan ketidakadilan karena memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada calon yang memiliki dana lebih besar. Politik yang berdasarkan hubungan keluarga juga menciptakan ketidakadilan karena mampu memberikan keistimewaan kepada calon yang mempunyai jaringan keluarga yang cukup luas, tanpa harus melihat kemampuan mereka²⁰. Dengan melakukan penerapan asas ini dapat menjadikan keadilan sebagai pondasi yang utama dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap legitimasi dan

¹⁶ Upe A, Jabal M, and Suaib E, 'Kontestasi Politik Kekerabatan Dalam Pemilihan Kepala Desa : Konteks Masyarakat Bugis', *In Indonesian Annual Conference Series*, 2022.

¹⁷ KPU KAB-MAMBERAMOTENGAH, 'Asas Dan Prinsip Pemilu Di Indonesia: Menuju Demokrasi Yang Bermartabat', 2025.

¹⁸ Saputri W. D and Prayogo B. E, 'Tantangan Demokrasi Di Era Globalisasi Demi Mewujudkan Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu', *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2018.

¹⁹ Nabilah and Aghniatus Shelly, 'Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (Money Politic) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', *Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan*, 2024.

²⁰ Alan Bayu Aji, 'Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024', *JURNAL HUKUM IN CONCRETO*, 2 (2023).

integritas dari hasil pemilihan umum.²¹ Hal ini menunjukkan bahwa sistem kekuasaan yang ada, masih berpusat pada garis keturunan atau marga dan bukan pada kehendak rakyat secara luas.

Asas kebebasan di dalam pemilihan artinya ialah seseorang yang memiliki hak untuk memilih tanpa ada unsur paksaan, tekanan, atau ancaman dari siapapun dan selalu menerapkan pilar demokrasi yang LUBER JURDIL.²² Namun, jika dilihat dari sisi kenyamanan, praktik money politik dan kekerabatan ini sering mengganggu kebebasan pemilih dalam melakukan pemilihan. Seperti money politik yang membuat tekanan ekonomi sehingga mendorong pemilih untuk menjual suara mereka tanpa menggunakan hak pilih rasional mereka sendiri²³. Sedangkan politik kekerabatan sering menciptakan tekanan sosial dan budaya yang dapat membuat pemilih merasa harus memilih anggota keluarga mereka atau yang semarga, asas-asas ini tidak dapat dipisahkan, karena dapat mewujudkan pemilu yang berkualitas.²⁴ Mereka juga harus mengenal dengan baik bagaimana calon keuchik yang akan memimpin di gampong, agar tidak hanya menilai berdasarkan kedekatan pribadi atau pendapat orang lain. Dengan begitu, keputusan yang diambil bisa bersifat lebih rasional dan sesuai dengan kepentingan Bersama.

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemilihan keuchik di Gampong Gunong Kleng masih dipengaruhi oleh dua faktor utama yang mengancam kejujuran demokrasi pada tingkat gampong atau lokal, yaitu faktor money politik dan faktor kekerabatan. Temuan ini membuktikan bahwa masyarakat pemilih belum semuanya menggunakan hak pilihnya secara logis sesuai dengan prinsip dalam pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL).

Dua faktor ini, money politik dan kekerabatan membuat pola perilaku pemilih menjadi sangat rumit, yang membuat masyarakat memilih berdasarkan atas keuntungan uang jangka pendek dan kerabat, dari pada mempertimbangkan kualitas seorang calon pemimpin gampong dan bagaimana rencana pembangunan gampong kedepannya. Kedua hal ini tidak hanya membuat pemimpin yang terpilih kurang baik, tetap juga bisa terbilang menyebabkan korupsi, ketidakadilan, hingga kecurangan dalam proses pemilihan.

²¹ Rajab A, 'Urgensi Pengaturan Mengenai Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah', *Jurnal Rechtsvinding Online*, 2020.

²² King Faisal Sulaiman, 'Zero Pilkada 2020', *Kedaulatan Rakyat*, 2019.

²³ Di S. Sawangan D and Mopeng E, 'L Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021 (Studi Di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi)', *Jurnal Politico*, 2015.

²⁴ Syafirullah L and others, 'F AHP METHOD IN DETERMINING RI 2024 PRESIDENTIAL CANDIDATES MILENIAL GENERATION CILACAP STATE POLYTECHNIC', *Jurnal Minfo Polgan*, 2023.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlunya peningkatan pendidikan politik kepada masyarakat setempat agar mereka sadar akan pentingnya memilih secara jujur dan logis. Kemudian dari pada itu, perlunya pengawasan yang lebih ketat dari tim atau petugas penyelenggara dan mengatur saat proses pemilihan, serta penegakkan hukum yang terus diperketat terhadap hal yang dapat melanggar aturan. Dengan cara ini, demokrasi pada tingkat gampong bisa menjadi lebih kokoh dan benar-benar bisa mewakili kepentingan masyarakat gampong, bukan hanya soal kepentingan pribadi atau kelompok saja.

Daftar Pustaka

- Adilla, M. Nazaruddin, Suadi, and Fauzi, 'Building Democracy From the Village: A Study of the Political Participation of the Sei Serdang Community', *Jurnal Mahasiswa Antropologi Dan Sosiologi Indonesia (JuMASI)*, 3 (2025), 79–94
<<https://doi.org/10.29103/jumasi.v3i2.12537>>
- Adnan Pattipeilohy, Nurbani Yusuf, and Trisakti Handayani, 'ANALISIS DAMPAK PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DI SMAN 1 BALAURING LEMBATA NTT', *Civic Hukum*, 3 (2018)
- Alan Bayu Aji, 'Penerapan Asas Keadilan Dalam Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024', *JURNAL HUKUM IN CONCRETO*, 2 (2023)
- 'Analisis. "Teknik Pengumpulan Data.', *Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi* 4, 2014
- Effendi Hasan, Aminah Aminah, and Haji Jamaie Haji Hamil, 'The Practice of Money Politics in Village Head Elections and Its Effect on The Participation Level of Beginner Voters', *Governance and Public Policy*, 10 (2023)
- Fitri Juliana, 'Ada Politik Uang Di Pilkada Kota Banda Aceh', 27 November, 2024
- Hanifa Triyuli Amanda, Irzal Anderson, and Kuswanto, 'Analisis Hubungan Kekeluargaan Dalam Perilaku Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Aro Tahun 2022', *Academy of Education Journal*, 15 (2024)
- Iman Nur Hidayat, Achmad Arif, Haerul Akmal, and Iman Nur Hidayat, 'Peran KPU Ponorogo Dalam Penanggulangan Money Politic Pilkada Kabupaten Ponorogo', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 15 (2021)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i1.5528>>
- king Faisal Sulaiman, 'Zero Pilkada 2020', *Kedaulatan Rakyat*, 2019
- KPU KAB-MAMBERAMOTENGAH, 'Asas Dan Prinsip Pemilu Di Indonesia: Menuju Demokrasi Yang Bermartabat', 2025
- N, Mustari, Yahya M., and M.Amin, 'Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Penguatan Civic Literacy Dalam Mewujudkan Desa Anti Money Politic Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Buakkang', *JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT*, 2021 <<https://doi.org/10.31764/transformasi.v1i3.5618>>
- Nabilah, and Aghniatus Shelly, 'Politik Hukum Pengaturan Larangan Politik Uang (Money Politic) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', *Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan*, 2024
- Pratama¹, Raja Songkup, Putri Permata Assiddiq Harahap², Pebryna Riosa, Siburian³, and Julia Ivanna⁴, 'Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di

- Dusun VIII Komplek Veteran Desa Medan Estate', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (2023), 1–5
- Rajab A, 'Urgensi Pengaturan Mengenai Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah', *Jurnal Rechtsvinding Online*, 2020
- Renaldi L., 'DINAMIKA POLITIK BERDESA : STUDI KASUS PILKADES DI DESA SUDIMORO, KECAMATAN SRUMBUNG, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH', *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2021
<<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.107>>
- Di S.Sawangan D, and Mopeng E, 'L Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Minahasa Utara Periode 2016-2021 (Studi Di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi)', *Jurnal Politico*, 2015
- Sacipto R., 'Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi', *Adil Indonesia*, 2019
- Saputri W. D, and Prayogo B. E, 'Tantangan Demokrasi Di Era Globalisasi Demi Mewujudkan Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu', *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 2018
- Saragih, Asha Yatri, and Julia Ivanna, 'Politik Keakerabatan Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Dolog Hulan Kabupaten Simalungun', *Journal on Education*, 6 (2024), 20619–26 <<https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6114>>
- Siagian A. M, and Permatasari Y., 'Insecurisme Politik Rakyat Indonesia Pada Pemilihan Kepala Daerah 2020', *POPULIKA*, 2022
<<https://doi.org/https://dx.doi.org/10.37631/populika.v10i1.380>>
- subrata t, 'ANCAMAN PIDANA BAGI MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI INDONESIA', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 2022 <<https://doi.org/10.59635/jihk.v9i2.247>>
- Syafirullah L, Setiawan Prabowo A, HafSarah Maharrani R, and Jurnal Minfo Polgan, 'F AHP METHOD IN DETERMINING RI 2024 PRESIDENTIAL CANDIDATES MILENIAL GENERATION CILACAP STATE POLYTECHNIC', *Jurnal Minfo Polgan*, 2023
- SYUKRI, RINI ANGGRIANI, 'No TitleAL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science', *DEPARTEMEN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS HASANUDDIN*, 2021, 1–51
- Upe A, Jabal M, and Suaib E, 'Kontestasi Politik Keakerabatan Dalam Pemilihan Kepala Desa : Konteks Masyarakat Bugis', *In Indonesian Annual Conference Series*, 2022